

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN TANGGUNG JAWABNYA

Iik saputri¹, Salito²

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ulum, Kubu Raya^{1,2}

liksaputri384@gmail.com¹, smilesalito@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to analyze the role and responsibilities of educational institutions within Indonesia's national education system, emphasizing the importance of cross-sector collaboration. A descriptive qualitative approach was employed through a literature study, focusing on historical, normative, theoretical, and empirical perspectives. The findings reveal that educational institutions serve multidimensional functions—as agents of social transformation, custodians of cultural values, and implementers of state policies. Within Bronfenbrenner's ecological systems theory framework, the effectiveness of education is determined by the interaction among micro (family, school), meso (interinstitutional relationships), and macro (policy and cultural) systems. Data from the 2021 National Assessment reveal low levels of basic literacy and numeracy, as well as disparities in education quality across regions. The COVID-19 pandemic further underscored the need for stakeholder collaboration in developing a resilient educational ecosystem. Moreover, technological disruption compels institutions to adopt 21st-century approaches, prioritizing soft skills development and digital literacy. Grounded in Ki Hadjar Dewantara's emancipatory philosophy, education should be humanistic and liberating aimed at developing whole, morally grounded individuals. The study concludes that transforming national education requires strategic coordination among the state, schools, families, communities, and industry sectors to achieve an inclusive and sustainable system.

Keywords: educational institutions, responsibility, family, technology, literacy, character education

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab lembaga pendidikan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia dengan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, dengan fokus pada telaah historis, normatif, teoritis, dan empiris terhadap pendidikan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan memiliki fungsi multidimensional sebagai agen transformasi sosial, penjaga nilai budaya, dan pelaksana kebijakan negara. Dalam kerangka teori ekologi Bronfenbrenner, efektivitas pendidikan sangat ditentukan oleh interaksi antara sistem mikro (keluarga, sekolah), meso (relasi antarlembaga), dan makro (kebijakan dan budaya). Data dari Asesmen Nasional 2021 mengungkapkan rendahnya literasi dan numerasi dasar serta ketimpangan kualitas pendidikan

antardaerah. Pandemi COVID-19 semakin menegaskan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam membangun ekosistem pendidikan yang tangguh. Selain itu, disrupsi teknologi mendorong lembaga pendidikan untuk mengadopsi pendekatan abad ke-21, yang menekankan penguatan soft skills dan literasi digital. Berlandaskan filosofi Ki Hadjar Dewantara, pendidikan harus bersifat emansipatif dan humanistik, membentuk manusia merdeka dan berkeadaban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi pendidikan nasional menuntut koordinasi strategis antara negara, sekolah, keluarga, masyarakat, dan sektor usaha guna mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci : lembaga pendidikan, tanggung jawab, keluarga, teknologi, literasi, pendidikan karakter.

PENDAHULUAN

Pendidikan bukan hanya sarana mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga wahana pembentukan kepribadian dan integritas manusia. Dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, lembaga pendidikan telah memainkan peran ganda: sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai penjaga nilai-nilai budaya. lembaga pendidikan di Indonesia tumbuh dalam berbagai bentuk, mulai dari pesantren, sekolah rakyat, hingga perguruan tinggi kolonial. Masing-masing mencerminkan paradigma zamannya—baik yang bercorak religius, nasionalis, maupun teknokratis. Seiring waktu, institusi-institusi ini berevolusi menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang kita kenal saat ini.

Dasar konstitusional pendidikan tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan kewajiban negara untuk membiayainya. Penjabaran lebih lanjut dapat ditemukan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Undang-undang ini tidak hanya menegaskan peran sekolah sebagai lembaga formal, tetapi juga mengakui pentingnya jalur non-formal dan informal, serta menempatkan keluarga dan masyarakat sebagai bagian integral dari ekosistem pendidikan.

Wacana pendidikan telah dikembangkan oleh berbagai tokoh dan pendekatan. Selain fungsionalisme struktural dan pedagogi kritis, pendekatan ekologi sosial pendidikan dari Bronfenbrenner juga memberikan kontribusi penting. Menurut teori ini, perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi antara sistem mikro (keluarga, sekolah), meso (relasi antar-lembaga), dan makro (nilai budaya dan kebijakan negara). Ini menggarisbawahi bahwa efektivitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kohesi dan koordinasi antarlembaga yang terlibat.

Dinamika pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan kompleks. Berdasarkan berbagai laporan evaluasi pendidikan pasca-2020, seperti hasil Asesmen Nasional, masih terjadi disparitas mutu antardaerah, lemahnya literasi dasar di berbagai jenjang, serta terbatasnya keterlibatan lembaga non-formal dan informal dalam proses pendidikan berkelanjutan. Kondisi ini diperparah oleh dampak pandemi yang menunjukkan bahwa sistem pendidikan sangat rentan bila hanya mengandalkan satu jalur formal. Banyak anak kehilangan akses belajar karena tidak tersedianya

dukungan teknologi dan lingkungan belajar yang memadai di rumah. Hal ini membuktikan pentingnya integrasi peran keluarga, masyarakat, dan negara dalam satu ekosistem pembelajaran yang saling menguatkan.

Selain itu, transformasi digital dan disrupsi teknologi membawa implikasi serius terhadap peran lembaga pendidikan. Sekolah dan universitas kini dituntut untuk tidak hanya mengajarkan konten, tetapi juga mempersiapkan peserta didik menghadapi realitas kerja dan kehidupan sosial yang cepat berubah. Pendidikan berbasis kompetensi, penguatan soft skills, dan pembelajaran lintas disiplin menjadi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, tanggung jawab lembaga pendidikan tidak hanya berfokus pada kurikulum dan manajemen, tetapi juga pada kemampuannya menjalin kemitraan strategis dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, dan sektor informal.

Pendidikan mengandung nilai-nilai emansipasi, kemanusiaan, dan keadilan. Dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara, pendidikan harus membebaskan dan memberdayakan, bukan sekadar membentuk individu menjadi mesin kerja. Pandangan ini mengakar kuat dalam prinsip pendidikan nasional yang menempatkan peserta didik sebagai subjek yang aktif dan merdeka dalam belajar. Maka, lembaga pendidikan, dalam bentuk apapun, memikul tanggung jawab moral untuk tidak sekadar mencetak lulusan, tetapi membentuk manusia seutuhnya.

Dengan mempertimbangkan dimensi historis, yuridis, teoritis, empiris, dan filosofis, dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan bukanlah entitas tunggal, melainkan sistem yang saling terhubung dan saling bergantung. Sinergi antarlembaga sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan globalisasi, ketimpangan sosial, dan dinamika masyarakat yang terus berubah. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah peran dan tanggung jawab lembaga pendidikan secara komprehensif, dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun pendidikan nasional yang inklusif, transformatif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada pemahaman mendalam terhadap konsep, peran, dan tanggung jawab lembaga-lembaga pendidikan berdasarkan perspektif historis, normatif, teoritis, dan empiris. Penelitian tidak bertujuan menguji hipotesis kuantitatif, melainkan menggambarkan dan menganalisis keterkaitan antar konsep secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran lembaga pendidikan di Indonesia tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai institusi formal yang mengelola kurikulum dan peserta didik dalam kerangka pembelajaran klasikal. Dalam sejarah panjangnya, lembaga pendidikan telah memainkan peran strategis sebagai agen transformasi sosial, sarana transmisi nilai budaya, serta arena artikulasi ideologi dan kebijakan negara. Evolusi kelembagaan dari pesantren tradisional, sekolah rakyat zaman kolonial, hingga universitas modern menggambarkan dinamika perubahan paradigma pendidikan yang dipengaruhi oleh konstelasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut

Perdana (2020), proses pendidikan di Indonesia selalu beriringan dengan upaya konstruksi identitas nasional, demokratisasi, dan perlawanan terhadap ketimpangan struktural.

Dalam pendekatan ekologi perkembangan yang dikemukakan oleh Urie Bronfenbrenner, proses tumbuh-kembang individu tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan melalui interaksi antar-sistem yang saling memengaruhi. Lima lapisan sistem dalam model ini—mikrosistem (keluarga, sekolah), mesosistem (hubungan antar institusi), eksosistem (kebijakan daerah), makrosistem (budaya, nilai dominan), dan kronosistem (perubahan historis)—memberikan kerangka untuk memahami kompleksitas pendidikan dalam konteks Indonesia (Nofianti & Rozana, 2023). Penerapan teori ini dalam studi pendidikan menunjukkan urgensi membangun ekosistem pembelajaran kolaboratif, yang melibatkan keterpaduan antara lembaga formal, keluarga, dan komunitas lokal.

Empirisme pendidikan Indonesia mendukung pendekatan ini. Sejumlah studi menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan karakter dan literasi tidak hanya bergantung pada intervensi sekolah, tetapi juga keterlibatan aktif orang tua, komunitas, serta media digital sebagai instrumen pembelajaran informal. Mujahidah (2015) dan Nofianti & Rozana (2023) menekankan bahwa partisipasi orang tua dalam proses pembelajaran berkontribusi signifikan terhadap internalisasi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati pada siswa. Ini menandakan bahwa pendidikan harus melampaui dinding sekolah dan menjadi proses sosial yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, berbagai evaluasi nasional termasuk Asesmen Nasional (2021) mengungkapkan bahwa sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang serius. Di antaranya adalah disparitas kualitas antarwilayah (terutama antara pusat dan daerah 3T), rendahnya tingkat literasi dan numerasi dasar, serta lemahnya sinergi antara pendidikan formal, non-formal, dan informal. Sekitar 50% peserta didik belum mencapai standar minimum literasi, dan lebih dari 60% belum kompeten dalam numerasi dasar (Kemendikbudristek, 2022; Al Hadi et al., 2024). Meskipun secara normatif kerangka hukum seperti UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 telah mengatur prinsip pendidikan nasional, implementasinya masih bersifat uneven dan inkonsisten.

Pandemi COVID-19 memperjelas kesenjangan ini. Ketergantungan yang tinggi terhadap sistem pendidikan formal menyingkap kerentanan dalam kesiapan infrastruktur teknologi dan rendahnya kapasitas lingkungan belajar di rumah. Kajian Agustin et al. (2020) dan Grafiati (2021) menyatakan bahwa keberhasilan pembelajaran jarak jauh sangat dipengaruhi oleh ketersediaan perangkat digital, akses internet, dan keterlibatan orang tua. Dalam banyak kasus, anak-anak dari keluarga dengan tingkat sosial-ekonomi rendah kehilangan akses belajar secara total selama masa pandemi. Hal ini memperkuat pentingnya membangun sistem pendidikan yang tangguh, adil, dan adaptif melalui ekosistem pembelajaran yang inklusif.

Dalam konteks global, lembaga pendidikan menghadapi ekspektasi baru yang menuntut mereka untuk tidak sekadar mengajarkan konten kognitif, melainkan juga membekali peserta didik dengan kompetensi abad ke-21, termasuk kreativitas,

berpikir kritis, kemampuan komunikasi, kolaborasi, literasi digital, serta resiliensi sosial dan emosional. Direktorat Jenderal GTK Kemendikbudristek (2022) mendorong pendekatan pembelajaran yang interdisipliner dan kontekstual dalam membentuk profil pelajar Pancasila yang adaptif dan progresif. Rekomendasi ini sejalan dengan laporan OECD (2021) yang menggarisbawahi pentingnya keterpaduan antara penguasaan kognitif dan kemampuan sosial-afektif untuk menyiapkan generasi pembelajar seumur hidup.

Dari sudut pandang filosofis, gagasan Ki Hadjar Dewantara tetap relevan dalam merumuskan arah pendidikan nasional. Pendidikan harus bersifat emansipatoris dan humanistik—membebaskan dan memerdekakan peserta didik dari belenggu struktural dan kultural yang membatasi potensi mereka. Dalam pandangan ini, peserta didik bukan objek pasif, melainkan subjek aktif dalam proses belajar. Lembaga pendidikan berperan sebagai “pamong” yang melayani kebutuhan individu dan masyarakat secara holistik. Prinsip ini selaras dengan semangat inklusivitas yang diusung dalam Salamanca Statement (UNESCO, 1994) dan agenda Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (UNESCO, 2015).

Dengan mempertimbangkan dimensi historis, normatif, teoritis, empiris, dan filosofis tersebut, jelas bahwa lembaga pendidikan merupakan bagian integral dari sistem sosial yang kompleks. Pendidikan nasional yang inklusif dan transformatif hanya dapat dicapai melalui sinergi lintas sektor—antara sekolah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan negara. Koordinasi antarlembaga bukan semata tuntutan normatif, melainkan menjadi kebutuhan praktis dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, mulai dari ketimpangan sosial, disrupsi teknologi, krisis ekologi, hingga tekanan geopolitik global. Transformasi pendidikan bukan hanya soal reformasi kurikulum, tetapi rekonstruksi paradigma pendidikan itu sendiri: dari yang bersifat eksklusif menjadi kolaboratif, dari yang berorientasi pada hasil menjadi berpusat pada proses, dan dari yang mekanistik menuju pendekatan humanistik dan ekologis.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan di Indonesia merupakan bagian dari sistem sosial yang kompleks dan dinamis. Dalam perspektif sejarah, lembaga pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat transmisi ilmu, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan pelestari nilai budaya. Teori ekologi Bronfenbrenner membantu menjelaskan pentingnya interaksi antara lingkungan mikro, meso, dan makro dalam membentuk efektivitas Pendidikan.

Temuan dari asesmen nasional dan studi lapangan membuktikan masih adanya tantangan signifikan seperti kesenjangan kualitas antarwilayah, rendahnya capaian literasi dan numerasi, serta keterbatasan integrasi antara jalur pendidikan formal dan non-formal. Pandemi COVID-19 semakin memperkuat pentingnya keterlibatan keluarga dan kesiapan teknologi sebagai komponen ekosistem pendidikan yang adaptif.

Transformasi digital dan tuntutan abad ke-21 mengharuskan pendidikan untuk tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pengembangan *soft skills*, literasi digital, dan pembelajaran lintas disiplin. Dalam konteks ini, nilai-nilai

pendidikan emansipatif ala Ki Hadjar Dewantara tetap relevan sebagai fondasi filosofis sistem pendidikan yang inklusif, humanistik, dan berkeadilan.

Sinergi lintas sektor antara negara, sekolah, keluarga, dan Masyarakat diperlukan untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang tangguh dan transformatif, mampu merespons dinamika sosial dan teknologi global secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustin, M., Puspita, R. D., Nurinten, D., & Nafiqoh, H. (2020). Tipikal Kendala Guru PAUD dalam Mengajar pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 533-540.
- Al Hadi, R. K., Yusron, E., Wiradika, I. N. I., Narendra, H. A., & Adem, A. M. G. (2024). Literasi dan numerasi anak usia 6-12 tahun: Peran status sosial ekonomi dan gender berdasarkan asesmen PEMANTI. *Measurement in Educational Research*, 4(2), 83-104.
- Direktorat Jenderal GTK Kemendikbudristek. (2022). *Arahan nasional GTK era Merdeka Belajar*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Grafiati, F. (2021). Efektivitas pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19: Studi kasus guru dan orang tua di pendidikan dasar. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 5(1), 20-30.
- Kemendikbudristek. (2022). *Laporan hasil Asesmen Nasional 2021*. Jakarta: Pusat Asesmen Pendidikan.
- Medcom (Swasty, R.). (2022, April 1). Hasil Asesmen Nasional 2021: Literasi numerasi SD butuh perhatian serius. *Medcom.id*. <https://www.medcom.id>
- Meriana, & Murniarti. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Guru SMP dalam Pengembangan Literasi Numerasi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 12(1), 45-55.
- Nofianti, R., & Rozana, S. (2023). Learning environment and early childhood character development in Bronfenbrenner's ecological systems theory. *International Journal of Educational Research*, 13(1), 1-12.
- Nurdin, N., & Anhusadar, L. (2020). Efektivitas Pembelajaran Online Pendidik PAUD di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 552-560.
- OECD. (2021). *OECD Work on Education & Skills 2021*. Paris: OECD Publishing.
- Perdana, R. (2020). Perkembangan kognitif dalam Islam dan model bioekologi Urie Bronfenbrenner untuk hidup di era revolusi 4.0. *Humanika: Kajian Ilmiah*, 19(2), 167-179.
- UNESCO. (2015). *Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action*. Paris: UNESCO.